

PERAN KIAI DALAM POLITIK PADA MASYARAKAT DI DESA KUALA MANDOR A KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:

MUHAMMAD ABDUL AZIZ

NIM E1051141012 Dr. Dwi Haryono, M.Si. Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si*Email

muhhammad.maaaa30@gmail.com

1. Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kiai dalam politik khususnya di Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metodologi kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Patoni (2014) tentang peran kiai dalam politik, yaitu: melakukan peran advokasi, menjadi mitra pemerintah, sebagai rujukan, dan sebagai mediator. Berdasarkan hasil penelitian fenomena meningkatnya transformasi peran kiai yang semula sebagai makelar budaya setelah reformasi meluas menjadi makelar politik atau bahkan aktor politik. Kharisma ketokohan seorang kiai lebih dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat, bukan hanya dalam masalah spritualitas saja, tetapi juga dalam keikutsertaan masyarakat dalam menentukan hak suara memilih dalam pesta politik. Kiai dengan segala aspek positif dan negatifnya baik tingkat nasional maupun lokal memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepada daerah.

Kata Kunci: Peran Kiai, politik lokal, masyarakat politik

Muhammad Abdul Aziz, NIM E1051141012

Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

**ROLE OF KIAI IN POLITICS IN THE COMMUNITY IN KUALA MANDOR A VILLAGE,
KUALA MANDOR B SUBDISTRICT, KUBU RAYA REGENCY**

ABSTRACT

This thesis aims to describe the role of the kiai in politics, especially in the village of Kuala Mandor A, Kuala Mandor B District, Kubu Raya Regency. This research uses a type of field research with a qualitative methodology. Informants in this study were determined by using a purposive technique. Data collection techniques used were observation, interview, and documentation. While the theory used in this study uses Patoni's (2014) theory about the role of the kiai in politics, namely: conducting an advocacy role, being a government partner, as a reference, and as a mediator. Based on the results of research the phenomenon of increasing transformation of the role of the kiai, which was originally a cultural broker after the reforms, has expanded to become a political broker or even a political actor. The charisma of a kiai's figure is more trusted and obeyed by the community, not only in matters of spirituality, but also in the participation of the community in determining voting rights in political parties. The kiai, with all its positive and negative aspects, both at the national and local levels, has a very significant role in general elections or regional elections.

Keywords: Role of kiai, local politics, political society

A. PENDAHULUAN

Di dalam dunia politik praktis, Pergumulan politik tidak hanya melibatkan mereka para politisi murni saja, tetapi sudah menjadi fenomena riil di lapangan bahwa para kiai (ulama) pun tak sedikit yang melibatkan diri dalam politik, baik perannya hanya sekadar simpatisan (pendulang suara) saja, atau mereka terjun langsung pada politik praktis.

Kiai sebagai produk sosial dari masyarakat adalah ciri khas yang melambangkan simbol pemimpin sebuah komunitas. Kiai sebagai pemegang otoritas keagamaan, otoritas dan kekuasaannya dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hubungan sosial saja, tetapi juga diterapkan dalam dunia politik.

Pengaruh seorang kiai tentu saja begitu luas terutama di kalangan umat Islam yang sering mengikuti langkah-langkah politiknya. Keberhasilan kiai dalam memimpin masyarakat menjadikannya semakin tampak sebagai orang yang berpengaruh, termasuk dalam ranah politik, sehingga mampu memberi peran signifikan dalam mempengaruhi dan menggerakkan aksi atau tanggapan emosional para pengikutnya.

Secara konseptual (kajian sosiologis), kiai dilihat sebagai pranata sosial. Entitas kiai akan ditempatkan sebagai sebuah pranata atau lembaga sosial di masyarakat. Dengan demikian, kiai dalam perspektif sosiologis, harus diposisikan secara objektif. Entitasnya tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang bahwa mereka adalah sebuah representasi moral dan religius dengan berbagai klaim kebenaran (*truth claim*) yang ada pada dirinya. Kiai sama dengan pranata sosial lainnya, terkadang mengalami *over-rated* dan *disfungsional* atau bahkan penyimpangan¹.

Melihat realitas sosial politik saat ini, figur kiai seringkali dijadikan momentum para elite politik (baik pusat maupun daerah) untuk merangkul kiai masuk dalam partai atau menjadi pendukung dalam kampanye politiknya. Mereka merasa kurang lengkap jika tidak melibatkan kiai ataupun sekadar untuk meminta restu kiai yang *notabene* dianggap sebagai tokoh spritual. Tentu dengan berbagai cara dan janji-janji politik yang menjadi bius sosial².

¹ Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik*: (Malang: UIN-Malang Press, 2007) hal.5.

² Imam Zamroni, *Dinamika Elit Lokal Madura*, (Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol 17. No. 1. Januari).

Peran penting seorang kiai dalam kehidupan beragama di masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup masyarakat. Dari realitas sosial inilah, diakui atau tidak, sosok kiai memiliki kekuatan (*power*) serta otoritas yang cukup tinggi untuk memobilisasi massa. Asumsi ini diperkuat dengan adanya fakta yang terjadi selama ini, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (legeslatif) dan Pemilihan Kepala Daerah bupati misalnya, setiap caleg dan calon gubernur/bupati, mencoba memanfaatkan kiai (sebagai juru kampanye) untuk meningkatkan perolehan suara mereka³.

Kharisma ketokohan seorang kiai lebih dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat, bukan hanya dalam masalah spritualitas saja, tetapi juga dalam keikutsertaan masyarakat dalam menentukan hak suara memilih dalam pesta politik, kiai dengan segala bentuk/variasinya memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi preferensi pilihan politik masyarakat. Hal yang demikian tidak hanya terjadi pada kiai tingkat nasional, tetapi juga tingkat lokal dan tak terkecuali di desa

Kuala Mandor A kecamatan Kuala Mandor B kabupaten Kubu Raya.

Terdapat 4 (empat) kiai di desa Kuala Mandor A yang terlibat dalam aktivitas politik, baik politik praktis ataupun sebagai simpatisan juru kampanye partai atau calon tertentu. untuk meningkatkan elektabilitas partai, caleg atau pasangan calon kepala daerah biasanya para kiai melakukan strategi pengumpulan massa atau jamaah dengan cara mengadakan acara keagamaan seperti istighosah, yasinan, imtihan PHBI atau pengajian-pengajian lain dan mendatangkan para calon yang didukungnya. Dan kiai tersebut mengkampanyekan atau mempengaruhi jamaahnya untuk memilih calon yang didukungnya tersebut.

Strategi ini dirasa efektif karena masyarakat Kuala Mandor A budaya patronisme pada kiai sangat kuat, sehingga apa yang disampaikan oleh kiainya akan diikuti oleh para jamaah atau masyarakat. Peran kiai dalam politik sebagaimana dijelaskan di atas tentu memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah ketika calon yang didukung atau dikampanyekan tersebut menang, maka banyak bantuan untuk

³Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura*, (Yogyakarta, Pilar Madura, 2007) hal.108.

kiai dan jamaahnya seperti bangunan di pondok pesantren maupun infrastruktur jalan masyarakat menjadi baik. Hal ini nampak ketika masa pilkada 2013-2018 bupati Rusman Ali menang, maka jalan raya Tanjung Pasir-Teluk Lerang dibangun oleh Rusman Ali dan ia sendiri turun langsung meresmikan jalan tersebut. Peran kiai Kuala Mandor A dalam politik pada satu sisi berdampak positif pada pembangunan daerah pendukungnya, namun di sisi lain dampak negatif atas peran kiai dalam politik ini menjadikan masyarakat pecah karena perbedaan pilihan yang didukung⁴.

Dari latar belakang masalah di atas, tentang tetap eksisnya peran kiai saat ini di tengah perkembangan masyarakat secara umum dan masyarakat desa Kuala Mandor A secara khusus, maka muncul suatu permasalahan yang oleh penyusun dirumuskan dengan sebuah pertanyaan: Bagaimana Peran kiai sebagai rujukan dalam politik pada masyarakat Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

B. KAJIAN PUSTAKA

⁴Data Lapangan 22 April 2018, di olah 26 Agustus 2018

B.1 Tinjauan Umum Tentang Kiai

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh masyarakat sebagai padanan dalam menyebut istilah ulama, diantaranya adalah *kiai*, *ulil albab* dan *cendikiawan muslim*. Istilah-istilah ini yang menurut masyarakat syarat dengan kandungan makna penghormatan kepada seseorang yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang ilmu yang sangat berkaitan dengan agama Islam⁵. Kata kiai merupakan kata yang sudah cukup akrab dalam masyarakat Indonesia. Kiai adalah sebutan bagi alim ulama islam. Kata ini merujuk pada figure tertentu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama Islam karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi. Kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya.

Seseorang yang dikatakan atau mendapat julukan sebagai kiai, adalah orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang alim. Kiai juga dapat

⁵Badruddin Subky, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman, (Jakarta: Gema Isani Press. 1995). Hal.58.

diartikan sebagai seorang yang dalam pandangan masyarakat secara umum dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu keagamaan bila dibandingkan dengan orang lain pada umumnya⁶.

B.2 Pengertian Peran Politik

Peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan berarti ia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga sebaliknya⁷.

B.3 Peran Kiai Dalam Politik

⁶Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban, membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 2000). Hal. 96.

⁷Ralph Linton, *Antropologi: Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*. (Bandung: Jemars, 1984). Hal. 268.

Peran kiai dalam politik menurut Patoni dapat dimaknai sebagai ikhtiar untuk membangun penataan masyarakat secara efektif meliputi:

1. Melakukan peran advokasi terhadap kepentingan umat dan membela terhadap rakyat lemah dalam menghadapi persoalan.
2. Menjadi mitra pemerintah ketika melakukan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah.
3. Sebagai *reference person* bilamana para kiai dianggap sebagai bahan rujukan dalam bersikap dan bertindak oleh masyarakat luas.
4. Sebagai mediator diantara kelompok-kelompok kepentingan bilamana kiai bertindak menjadi penghubung antara berbagai kelompok kepentingan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan paradigma deskriptif. Adapun hal yang akan di deskripsikan adalah hal-hal yang merupakan hasil penelitian mengenai Bagaimana Peran kiai sebagai rujukan dalam politik pada masyarakat Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu KH.

Mustahar (pengasuh pesantren Darul Futuh Tanjung Pasir, KH. Munali (pengasuh pesantren Mansyaul Ulum Teluk Lerang), Kiai Fudhali (Ketua Yayasan Ar-Raudhah Pematang Rambai), dan KH. Masuri Pengasuh Pesantren Raudhatul Ulum Pematang Rambai Hilir) Desa Kuala Mandor A.

Untuk mendapatkan data-data yang diinginkan maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengungkap data dan informasi yang akurat mengenai peran kiai dalam politik pada masyarakat di Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu Teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan triangulasi sumber dan teknik. Pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi serta dengan pengecekan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1 Peran Advokasi Kiai di Desa Kuala Mandor A

Permasalahan umat di desa Kuala Mandor A secara sosio-religi-politis tidak jauh berbeda dengan permasalahan umat di tempat lain yang ada di kecamatan Kuala Mandor B Kubu Raya. Masyarakat di Desa Kuala Mandor A pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai pekebun karet, bercocok tanam (petani). Kegiatan hidup sehari-hari masyarakat sesuai dengan profesi dan pekerjaan mereka masing-masing, ada yang kesehariannya bekerja di ladang, kebun, mengajar di sekolah, jadi kuli bangunan, mencari kayu bakar tumpuk (kobekan), dan segala macam kegiatan keseharian.

Dalam hal dukungan atau pilihan politik baik tingkat daerah maupun pusat, ketika kiai mendukung partai atau pasangan calon tertentu, bilamana yang didukungnya dicitrakan buruk, maka kiai tersebut memainkan perannya dengan memberikan advokasi dalam bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, dan pernyataan pemberian dukungan, atau bahkan rekomendasi kepada masyarakat berupa dukungan aktif pada calon yang didukung. Selain itu, untuk meredam gesekan di masyarakat sosok kiai memberikan himbuan dan penjelasan pada masyarakat bahwa berbeda pilihan dalam pesta demokrasi itu sudah biasa, karena yang diinginkan adalah sama-

sama bertujuan untuk kemaslahatan umat atau kesejahteraan masyarakat, terutama kemaslahatan yang berkaitan dengan infra struktur lembaga pesantren yang dibina serta infra struktur pembangunan jalan masyarakat.

Advokasi dapat diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, orang yang menjadi sasaran atau target advokasi ini adalah para pimpinan suatu organisasi atau institusi (lembaga) kerja baik di lingkungan pemerintah maupun swasta dan organisasi kemasyarakatan diberbagai jenjang administrasi pemerintahan (tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan Pedesaan). Dalam advokasi peran komunikasi sangat penting sebab dalam advokasi merupakan aplikasi dari komunikasi interpersonal, maupun massa yang ditujukan kepada para penentu kebijakan (*policy makers*) atau para pembuat keputusan (*decission makers*) pada semua tingkat dan tatanan sosial.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa advokasi yang dilakukan oleh kiai di desa Kuala Mandor A adalah dalam bentuk upaya untuk mempengaruhi masyarakat dengan melakukan berbagai macam pola

komunikasi yang bersifat persuasif serta membantu agar progam dan kebijakan-kebijakan dari caleg partai atau pasangan calon yang didukungnya tersalurkan kepada masyarakat.

Kiai sebagai sebagai sosok yang ditokohkan dan memiliki kharisma juga melakukan advokasi ketika masyarakat mendapatkan kesulitan, menjadi penengah ketika ada perselisihan dan memberikan solusi atas segala yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungan desa dan sekitarnya. Hasil dari Advokasi yang dilakukan kiai di desa Kuala Mandor A adalah perubahan pola pikir masyarakat yang awalnya sentimen dan fanatik *an sich* pada tokoh pilihan politiknya menjadi lebih moderat dan menerima perbedaan atas sebuah pilihan politis, tak hanya itu, hasil dari advokasi yang dilakukan kiai pada akhirnya berpengaruh juga terhadap kebijakan-kebijakan para legislator dan pemerintah yang mereka dukung dengan lebih banyak turun dan membantu pembangunan infra struktur di wilayah basis pendukungnya.

D.2 Kiai Sebagai Mitra Pemerintah

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran kiai dan pemerintah menjadi sebuah kesatuan penting dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang ideal.

Sebelum sistem pendidikan dilakukan oleh Belanda, pesantren adalah satu-satunya sistem pendidikan yang ada. Bahkan sampai sekarang pesantren di Indonesia masih memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dan norma agama. Oleh karenanya, setiap elit politik dan elit yang memerintah harus selalu memberi perhatian khusus kepada para kiai yang memiliki pondok pesantren.

Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan kiai pesantren harus terjalin dengan baik karena pesantren memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya, sudah semestinya kedua elemen tersebut saling mengisi dalam perumusan berbagai kebijakan yang menyangkut kemaslahatan umat. Dalam konteks formal perlu ada upaya dari pemerintah untuk melibatkan para kiai dalam proses perencanaan pembangunan. Para kiai pesantren dapat memberikan masukan, mengontrol bahkan mitra dalam mensosialisasikan berbagai program/kebijakan pemerintah.

Hubungan antara kiai pesantren dengan pemerintah dalam pembangunan sifatnya berbentuk kemitraan, bukan sub sistem birokrasi. Bahkan tanpa partisipasi konstitusional politik berbasis kekuasaan, pesantren justru sudah

melampaui sistem birokrasi untuk mencapai politik yang berbasis kebangsaan dan kerakyatan. Dengan relasasi seperti ini tentu berdampak positif bagi yayasan pondok pesantren ataupun bagi masyarakat.

D.3 Kiai Sebagai *Reference Person*

Hubungan antara kiai dan masyarakat lahir dari persepsi masyarakat bahwa kepemimpinan kiai adalah nyata dan kiai adalah seorang ahli yang dapat memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran al-Quran. Sering terjadi pula asumsi bahwa orang (yang dianggap) suci atau *syekh* mempunyai hubungan geneologis dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kepemimpinan mereka dianggap sah. Kiai juga dianugrahi sifat-sifat simbolik tertentu yang membuatnya berbeda dengan masyarakat lain. Konsep ini membuat masyarakat menaruh rasa hormat yang tinggi pada kiai dan tunduk serta patuh kepada kepemimpinannya dalam bidang apapun.

Kepentingan politik kiai di Desa Kuala Mandor A yang notabene berlatar belakang NU direalisasikan dengan keterlibatan mereka dalam parpol Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (KH. Masuri), Partai Persatuan

Pembangunan (KH. Munali) dan Partai Kebangkitan Bangsa (KH. Mustahar dan Kiai Fudhali), mereka memilih partai Islam sebagai wadah penyalur aspirasi kaum Nahdliyin di desa Kuala Mandor A. Dengan merujuk pada landasan politik Islam dan cita-cita politik partai berdasar Islam ini, maka setiap anggota dan aktivis organisasi keagamaan tersebut mengembangkan pola hubungan dengan konstituen Islam yang bersifat historis, kultural, dan aspiratif.

Hubungan politik tokoh organisasi keagamaan (kiai) yang bersimbiosis dengan partai Islam dalam preferensi politik masyarakat Kuala Mandor A dapat dilihat dalam hubungan sebagai berikut:

- a. Hubungan historis yaitu masyarakat Kuala Mandor A menyadari bahwa partai Islam dirintis dan dilahirkan oleh ulama, sebagai wujud nyata kepedulian mereka terhadap masa depan kehidupan politik bangsa dan tekad melaksanakan cita-cita politik warga Islam yaitu mengangkat harkat dan martabat umat.
- b. Hubungan kultural dalam arti masyarakat desa Kuala Mandor A menyadari bahwa partai Islam lahir dari suatu lingkungan kebudayaan dan keagamaan yang

khas dengan organisasi keagamaan yang mereka ikuti.

- c. Hubungan aspiratif yaitu kiai sebagai pendukung partai Islam memahami sepenuhnya bahwa partai Islam sebagai kumpulan politik (*jamiyyah as-siyasah*), memiliki landasan, pandangan dan sikap politik yang mana setiap umat (warga Kuala Mandor A) yang menjadi anggota NU harus memilih partai Islam yang memperjuangkan landasan, pandangan dan sikap politik organisasi itu partai Islam.

Kaitannya dengan pemilu atau pelkada guru (kiai) menjadi referensi masyarakat/santri dalam menentukan pilihan, dan banyak ditemui dalam menghadapi pemilu/pilkada masyarakat/santri di desa Kuala Mandor A akan datang bertanya dan ingin mengetahui kemana arah dukungan kiainya, tujuan tersebut untuk mengetahui dukungan dan kemudian mengikutinya sebagai bentuk kepatuhan terhadap petunjuk kiai.

D.4 Peran Kiai Sebagai Mediator Konflik Antar Kelompok Kepentingan

Konflik merupakan suatu

fenomena sosial politik. Konflik ini selalu membutuhkan suatu akar sosial tertentu serta selalu diikuti oleh kelompok-kelompok yang memiliki anggota dengan karakteristik sebagai “pemeluk teguh “(*True Believer*) yang memperjuangkan tujuan tertentu yang dianggap sebagai “tujuan suci”. Kelompok-kelompok seperti ini biasanya didasarkan pada kriteria kesamaan tertentu, baik kesamaan suku, kesamaan kehidupan sosial ekonomi, budaya, pendidikan, agama, ras, dan sebagainya. Kelompok dengan tipe seperti ini seringkali pula diikuti oleh beberapa karakteristik lain sebagai kelompok sendiri (*In-group*) yang erat, yang diidentifikasi oleh anggotanya memiliki kesamaan tertentu.

Kiai sebagai elit agama seringkali menjadi target sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Sebagai elit agama yang memiliki kekuasaan karismatik, serta mampu menggunakan dalil-dalil keagamaan, dalam konteks Pemilu dan Pilkada. Perang opini antar kiai sering terjadi saat mengkampanyekan calon yang didukungnya, atau terhadap calon lain yang menjadi lawan politik mereka. Perang opini inilah yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat sekitar sehingga tercipta citra yang positif bagi kandidat yang mereka dukung, atau

mungkin sebaliknya bagi calon lainnya. Perbedaan afiliasi politik kiai juga bukan mustahil menimbulkan respon beragam dari komunitas masyarakat yang sebelumnya menempatkan kiai sebagai *opinion leader* ataupun referensi utama pengambilan keputusan pilihan politik yang harus ditaati.

Bentuk peran atau keterlibatan kiai dalam pembentukan opini publik (*opinion leader*) diperlukan media secara verbal (pesan politik), misalnya berbicara langsung kepada masyarakat, termasuk di dalamnya santri dan para alumni pesantren, maupun dilakukan secara non-verbal, melalui undangan-undangan dari pihak partai politik yang mempunyai kepentingan politik terhadap kharisma kiai. Berdasarkan ijtihad politiknya, ada kiai yang harus menjaga agar jangan terlalu jauh dalam politik, meskipun para kiai sesungguhnya sangat mengerti tentang politik. Sebab pendapat kiai diyakini memiliki kemampuan untuk mengarahkan pendapat dan meneruskan pesan sekaligus meyakinkan publik.

Dampak dari kiai berpolitik praktis pada di tingkat bawah ialah jika keberadaan mereka (para kiai) sudah tidak dapat dijadikan panutan dalam kehidupan umat. Umat menjadi bingung dengan arah para kiai mereka. Pasalnya, masing-masing kiai seolah menjadi

makelar dagangan yang bernama "tahta". Mereka mengabaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya dalam kehidupan sosial politik.

Dalam kaca mata realita, yang terjadi sejauh ini, keberadaan para kiai dalam dunia politik, mulai dan sudah terkotak-kotak. (ada kiai yang masuk tingkatan khos, kiai sepuh, dan sebagainya). Akibat dari dukung-mendukung partai politik, tidak jarang silaturahmi menjadi renggang hanya karena masing-masing berbeda visi dan dukungan politiknya.

Memang tidak selamanya politik praktis merupakan "barang kotor", tetapi pemahaman masyarakat umum telah menempatkan politik sebagai media persaingan perebutan kekuasaan. Oleh karenanya, Para kiai di desa Kuala Mandor A yang memosisikan dirinya sebagai mediator politik, menjadi mediator kelompok yang berbeda pendapat serta dengan kedudukan kiai sebagai tokoh agama haruslah membangun partisipasi pemilih dengan sering menggunakan panggung dakwah sebagai arena untuk menyampaikan pesan politis yang damai dan bermoral.

Kiai sebagai pemegang otoritas keagamaan, otoritas dan kekuasaannya dalam masyarakat tidak hanya terbatas

pada hubungan sosial saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam dunia politik. Pengaruh seorang kiai begitu luas di kalangan umat Islam begitu juga di desa Kuala Mandor A, salah satunya yaitu pengaruh dalam mengikuti langkah-langkah politiknya. Keberhasilan kiai dalam memimpin masyarakat, menjadikannya semakin tampak sebagai orang yang berpengaruh, termasuk dalam ranah politik, sehingga mampu menjadi mediator para masyarakat yang berbeda pendapat serta meredam emosional para pengikutnya.

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terkait bagaimana peran kiai dalam politik pada masyarakat Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, khususnya peran advokasi, peran sebagai mitra Pemerintah, peran sebagai preferensi politik dan peran peran sebagai mediator konflik antar kelompok kepentingan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kiai desa Kuala Mandor A melakukan advokasi ketika masyarakat mendapatkan kesulitan, menjadi penengah ketika ada perselisihan dan memberikan solusi atas segala yang dihadapi oleh

- masyarakat di lingkungan desa dan sekitarnya. Tak hanya itu, advokasi yang dilakukan oleh kiai di desa Kuala Mandor A juga dalam bentuk upaya untuk mempengaruhi masyarakat dengan melakukan berbagai macam pola komunikasi yang bersifat persuasif serta membantu elit partai atau pasangan calon kepala daerah yang didukungnya dengan tindakan pembelaan, pernyataan pemberian dukungan, rekomendasi berupa dukungan aktif pada calon yang didukung sehingga program-program dan kebijakan-kebijakannya tersalurkan kepada masyarakat.
2. Bahwa peran kiai sebagai mitra pemerintah terimplementasi dalam hubungan timbal balik (*take and give*), dimana kiai memberikan kontrol (*second control*) serta masukan kepada pemerintah sekaligus menjadi mitra dalam mensosialisasikan berbagai program/kebijakan pemerintah, baik melalui pemerintah daerah (Pemda) sendiri atau melalui Direktorat Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren Kementerian Agama dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM, pendidikan dan infra struktur pesantren di desa Kuala Mandor A.
 3. Bahwa peran kiai sebagai referensi politik masyarakat desa Kuala Mandor A dalam menentukan pilihan partai dan pilihan calon kepala daerah terbentuk karena pola hubungan emosioanal yang terjadi antara masyarakat dan santri pada kiai (guru) bersifat patron klien serta bersifat *sami'na wa atho'na* sebagaimana falsafah madura "*bhuppa', bhappu', ghuru, ratoh*" (Orang tua, Ibu, Guru, Pemerintah) menjadikan kiai memiliki legitimasi kuat dalam segala aspek, termasuk dalam konteks afiliasi politik masyarakat. Sebagai *preferensi person* dengan kelebihan kharisma dan patriarkinya, apa yang dilakukan kiai diikuti oleh masyarakatnya.
 4. Kiai berperan sebagai mediator (penengah) kelompok-kelompok yang berkepentingan politik di desa Kuala Mandor A. Perbedaan pendapat atau pilihan dalam pemilu/pilkada yang terjadi pada masyarakat desa Kuala Mandor A mereda sistuasinya setelah kiai memediasi (menjadi penengah) dalam konflik politik tersebut. Istilah-istilah tertentu seperti istilah fatwa, istilah patuh kepada guru (*kiai*), istilah "*islah*" atau istilah

“bersama kiai” menjadi media yang cukup kuat dan signifikan serta wajar sebagai cara untuk menarik hati pemilih, mendamaikan serta menyatukan kembali kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan dan pilihan politik di desa Kuala Mandor A.

F. SARAN

1. Bagi pemerintah setempat hendaknya dapat lebih meningkatkan pendidikan politik masyarakat desa Kuala Mandor A.
2. Hendaknya masyarakat harus bisa membedakan di mana posisi kiai sebagai panutan dalam masalah politik dan kiai sebagai panutan

dalam masalah agama dan sosial.

3. Bagi seorang kiai *plus* politisi, hendaknya mampu menjalankan kedua profesinya secara ikhlas dan istiqomah. Jika tidak, pengaruh kiai menjadi tidak bermakna, ketika otoritasnya dianggap telah menyimpang dari apa yang seharusnya.
4. Bagi kiai yang memegang penuh kekuasaan terhadap pesantren hendaknya tetaplah pesantren yang dijadikan prioritas utama mengingat anak didik yang diasuhnya juga sebagai generasi penerus dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta : LP3ES
- Hidayat, Imam, 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA Press.
- Linton. Ralph. 1984 *Antropologi: Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*. Bandung: Jemars.
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Patoni, Ahmad. 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1998. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rifai, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Subky, Badruddin. 1995. *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suprayogo, Imam. 2007. *Kiai dan Politik*. Malang: UIN-Malang Press.
- Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS .
- Zamroni, Imam. 2012. "Dinamika Elit Lokal Madura". *Jurnal Sosiologi Masyarakat*.
Vol. 17. No. 1. Januari.